Perpustakaan Daerah D.I.Y.
RUANG BACAAN

Kamis Kliwon 13 Agustus 1998
19 Bakdamulud 1931
Tahun LIII No. 309

Kedaulatan Rakyat on line: http://www.kedaulatan-rakyat.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Harian Pagi
Terbit 8 Halaman
Eceran Rp 1.200

KR-JOS/ADIB

MANTAN KSAD KEMUNGKINAN AKAN DIPERIKSA

Prabowo Mengaku Salah

JAKARTA(KR) - Mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui bersalah, karenanya ia siap bertanggungjawab. Pengakuan tersebut disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksanya di Markas Besar TNI AD, Rabu (12/8). "Prabowo mengakui kesalahannya dan dia sudah menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkannya. Hal seperti itu adalah sikap keperwiraan dan setiap kesalahan memang harus dipertanggungjawabkan," kata Ketua DKP yang juga KSAD Jenderal TNI Subagyo HS.

Menurut Subagyo, bentuk kesalahan yang dilakukan Prabowo yakni kesalahan dalam menganalisis Bawah Kendali Operasi (BKO). Yang jelas, lanjut Subagyo, perintah BKO itu bukan datang dari Panglima Tertinggi ABRI (saat itu dijabat Presiden Soeharto) maupun Pangab (Saat itu Jenderal Feisal Tanjung).

Ketika wartawan mendesak dari siapa BKO itu diberikan, Subagyo belum bersedia menjawab. Meski demikian ia mengisyaratkan, bisa saja perintah itu atas inisiatif Prabowo sendiri. Atau, bisa pula perintah tersebut datang dari perwira yang lebih tinggi.

Seperti diketahui, perwira tinggi yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo saat menjabat Danjen Kopassus diantaranya Jenderal R Hartono (saat itu Kasad), Letjen TNI Tarub (Kasum ABRI), dan Letjen TNI Wiranto (Pangkostrad). Namun Subagyo tetap tidak mau menjawab apakah salah satu diantara mereka memberi perintah BKO.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan pasukan Kopassus yang di-BKO-kan itu membawa misi tertentu dari yang memberikan perintah, Subagyo hanya menegaskan bahwa yang salah adalah Letjen TNI Prabowo Subianto. Kesalahannya adalah dalam pem-BKO-an yang semestinya dikeluarkan surat perintah. "Dengan demikian telah terjadi salah penganalisaan terhadap BKO," tambah Subagyo.

Menanggapi pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto belum lama ini yang mengatakan bahwa DKP bisa saja memeriksa perwira tinggi ABRI yang pangkatnya lebih tinggi daripada Letjen Prabowo, Ketua DKP menegaskan, setiap perwira ABRI yang salah atau ada keterkaitannya tentu harus bisa diperiksa.

"Pangab tidak salah, karena tidak mengeluarkan perintah itu," katanya seraya mengatakan kemungkinan mantan Kasad akan diperiksa, masih menunggu perkembangan. Dijelaskan pula, dalam sidang DKP, pemeriksaan berkisar pada masalah disiplin, prosedur, kejujuran, tabiat dan sikap keperwiraan terperiksa.

Keterangan Tambahan

Pemeriksaan terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf Chairawan berlangsung mulai pukul 09.00-11.30 WIB. Seperti sebelumnya, pemeriksaan berlangsung tertutup. Wartawan hanya melihat Letjen TNI Prabowo Subianto memasuki Mabes TNI AD pukul 08.25 WIB.

Tampak anggota DKP, seperti Letjen TNI S Bambang Yudhoyono, Letjen TNI Jusuf Kartanegara, Letjen TNI Djamari Chaniago, Letjen TNI Agum Gumelar, Laksdya TNI Achmad Sutjipto, dan Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi, memasuki ruang sidang dari pintu depan Mabes TNI AD.

Subagyo menegaskan, pemeriksaan kembali mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto dan Mayjen TNI Muchdi PR sebagai hal yang biasa. "DKP ingin melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan dan hasilnya akan disampaikan kepada Pangab berupa saran atau rekomendasi," katanya seraya mengatakan kedua perwira tersebut diperiksa kembali karena DKP masih memerlukan keterangan tambahan.

* Bersambung hal 8 kol 6

CAK NUR SOAL KONGLOMERASI

Soeharto Lanjutkan Politik Ekonomi PKI

YOGYA (KR) - Cendekiawan muslim Dr Nurcholis Madjid melihat, untuk bicara soal konglomerasi di Indonesia tak dapat dilepaskan dari dimulainya kepresidenan Pak Harto dengan anti PKI. Unsur Pak Harto yang sangat dipengaruhi adalah melanjutkan politik ekonomi PKI untuk menghancurkan pengusaha-pengusaha pribumi.

Nurcholis Madjid mengemukakan hal tersebut saat dialog dalam Semiloka 'Menuju Platform Gerakan Reformasi Menuju Kesatuan dan Persatuan Bangsa' di Auditorium Graha Sabha Pramana UGM, Rabu (12/8). Semiloka diprakarsai BKS-PTISI diselenggarakan Kagama bersama Iluni-UI, IA-ITB, IKA-IPB dan Unair Airlangga. Untuk hari ke-2 Kamis (13/8) hari ini direncanakan dihadiri Dr H Said Siradj, Megawati Soekarnoputri, Ir Siswono Yudhohusodo, Dr Sindunata, Letjen TNI Agum Gumelar, Ir Mario Carascalao, Dr HM Amien Rais dan Letjen Kemal Idris.

Ditandaskan Nurcholis yang akrab dipanggil Cak Nur, *enterpreneurship* pribumi seperti Hasjim Ning, Soehadio, Markam dan lainnya itu di zaman Bung Karno *diopeni* meski sebagian besar Masyumi. Namun karena Pak Harto meneruskan politik ekonomi PKI dan tidak kasihan kepada wirausahawan tersebut, akhirnya semua hancur.

Banyak sekali industri-industri yang dikerjakan masyarakat pribumi menjadi hancur. "Bahkan *pacul* yang kita dulu bisa membuatpun diimport dari Shanghai. Karena daripada membuat *pacul* menurut Pak Harto lebih baik membeli dari RRC yang lebih mahal sedikit. Dengan adanya selisih itulah Pak Harto mendapatkan untung," jelasnya.

Padahal, tandas Cak Nur, yang mengerjakan industri logam, batik dan lainnya adalah kalangan warga Masyumi. "Entah apa sebabnya Pak Harto *gengit* sekali. Sebagai Ketua HMI, saya *gemes banget*," ujar Nurcholis.

Ibadah Haji

Kalau kemudian Pak Harto begitu terlihat Islami, menurut Cak Nur tak lepas dari mulai meningkatkan pendidikan kelompok masyarakat Muslim itu sendiri. Kalau tahun 70-an sudah makin banyak lulusan perguruan tinggi meski efeknya belum tampak, sebab masih sibuk dengan masalah domestik.

Pada tahun 80-an mulailah kalangan berpendidikan ini berubah dari *inwork looking* menjadi *outwork looking* dan muncullah gejala Islam di mana-mana.

"Daripada kalah, lebih baik menunaikan ibadah haji. Dan ini sebenarnya merupakan bagian dari adaptasi keadaan. Kalau tidak, terlambat," jelasnya.

* Bersambung hal 8 kol 7

KOMNAS HAM: USUT TUNTAS KASUS 27 JULI

2 Tokoh PDI Soerjadi Gabung Mega

SEMARANG (KR) - Dua tokoh PDI Jateng, Drs Suyanto dan Soetjipto Tjipto Soewignyo, Rabu (12/8) mengundurkan diri dari kepengurusan PDI Soerjadi untuk selanjutnya bergabung dengan Megawati. Sikap kedua kader Banteng ini diikuti beberapa pengurus di tingkat cabang, antara lain Yusak L Diyono SPd (Sekretaris DPC PDI Kodya Semarang). Suyanto dan Yusak menyatakan bergabung setelah dijemput di rumah masing-masing untuk dibawa ke Panti Marhaens yang menjadi markas DPD PDI Jateng.

Surat pernyataan mundur Soetjipto tersebut dibacakan salah seorang aktivis DPC PDI Pro-Mega Kabupaten Semarang di depan ratusan pengunjukrasa yang menuntut pembubaran PDI Soerjadi di halaman Pemda Jawa Tengah. Dalam mimbar bebas tersebut, Wagub I Jateng Drs Hartono menyatakan secara 'de facto' Pemda Jateng mendukung PDI Megawati. Tetapi secara 'de jure' pemerintah pusat masih mengakui PDI hasil Kongres Medan pimpinan Soerjadi. Aksi berlangsung tiga jam dan diakhiri dengan konvoi keliling kota Semarang.

Setelah pengurus PDI Soerjadi di Jateng banyak yang mundur, Suratal HW, Ketua DPD PDI Pro-Mega mengatakan sesuai pesan Ketua Umum DPP PDI Megawati, tidak perlu mengutik-utik jabatan yang bersangkutan di DPR. "Yang penting PDI bersatu, silakan jabatan di Dewan dilanjutkan," tegas Suratal menirukan pesan Megawati. Sementara Suyanto mengatakan pasrah dengan keputusan apapun yang dijatuhkan DPP Megawati tentang statusnya sebagai anggota DPR RI.

Soetjipto yang juga ketua FPDI DPRD Jateng menyatakan mundur lewat pernyataan tertulis yang dibuat hari Rabu (12/8) di kediamannya di Desa Tuntang Kabupaten Semarang. Dia menegaskan sikap yang ditempuh tidak ada tekanan dari pihak mana pun kecuali dengan harapan PDI bersatu kembali.

Sedangkan upaya fungsionaris DPD PDI Perjuangan membujuk Suyanto dan Yusak agar bersedia bergabung memakan waktu sekitar dua jam, setelah melalui adu argumentasi. Semula Suyanto minta waktu semalam untuk berfikir tanpa disertai intervensi. Namun Suratal cs mengatakan harus saat ini, karena waktu berfikir sudah dua tahun sejak Megawati digulingkan.

Drama penjemputan Suyanto dan Yusak berlangsung mulus, karena kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan. "Saya tidak takut saat dijemput, karena saya mempunyai komitmen PDI harus disatukan. Saya bersedia dijemput bukan karena dipaksa tetapi semata tuntutan nurani untuk menyatukan PDI," tegas Suyanto yang menjadi anggota DPR RI dari ... Rektor Untag Se...

Dari tangan para tersangka berhasil disita berbagai barang bukti berupa 150 meter kawat listrik, dua gergaji, tali, kikir dan pisau pemotong.

Diduga para pelaku merupakan orang-orang profesional yang tahu persis tentang listrik, atau disinyalir yang bersangkutan pernah bekerja sebagai BTL.

Dari pengakuan tersangka,

KOLOM - 9

ONH '99 Rp 27,3 Juta

PEMERINTAH menetapkan ongkos naik haji (ONH) 1999 sebesar Rp 27,373 juta atau sama dengan 2.737 dolar. Ini berarti melonjak 3 kali lipat dibanding ONH tahun lalu yang hanya sekitar Rp 9 juta. Demikian diputuskan dalam sidang kabinet terbatas bidang Kesra di Binagraha, Rabu (12/8). **(Mgn)-a**

Fadjri Segera Bebas

MAJALAH D&R, Rabu (12/8) mengharapkan kepada Deplu RI untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar agar ketiga warga Indonesia yang ditahan di Myanmar ... ra di...

... Nurdjaman saat dikonfirmasi di kantornya kepada wartawan membenarkan. Dikatakan operasi tersebut dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Klaten dengan sasaran curanmor, curat, curas dan pelanggaran lalulintas.

Sehubungan mulai maraknya pencurian kawat listrik di Klaten, Kapolres mengemukakan, dari laporan PLN telah kehilangan sekitar 1300 meter kawat listrik. **(R-16)-d**

BESOK, DI ISTANA NEGARA

Amien Rais Dapat Bintang Mahaputera

YOGYA (KR) - Presiden BJ Habibie menu... PP Muhammadiyah menduga penganugerahan Bintang Mahaputera itu tidak bisa

PEMILIHAN GUBERNUR DIY "JALAN DI TEMPAT"

Beres, Jika Presiden Keluarkan Keppres

YOGYA (KR) - Pemilihan Gubernur DIY sampai Rabu (12/8) masih macet dan macet lagi. ... tidak perlu repot-repot lagi. Namun demikian, ia mengaku tidak melihat ada upaya DPRD untuk 'mendorong' keluarnya Keppres tersebut.